

**PERINGANAN SANKSI PIDANA PENJARA DENGAN KEADILAN
RESTORATIF DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF**

Jocelyn Zefanya Tjandra

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Keadilan restoratif telah menjadi salah satu kebutuhan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini menjadi penting sebab kurangnya keadilan bagi korban dan penuhnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pembunuhan juga dianggap tidak adil bagi beberapa pihak, meskipun keadilan restoratif ini digunakan untuk meringankan sanksi pidana. Tulisan ini berfokus pada penerapan keadilan restoratif yang digunakan oleh Hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana pembunuhan berdasarkan Surat Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana, sebab tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat yaitu pembunuhan. Surat Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menentukan bahwa perkara pidana yang dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Tindak pidana pembunuhan tidak termasuk dalam ruang lingkup pedoman penerapan keadilan restoratif, sehingga pada tindak pidana pembunuhan tidak bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Pemaafan; Peringatan Sanksi Pidana.

**THE MITIGATION OF IMPRISONMENT SANCTIONS WITH
RESTORATIVE JUSTICE IN REVIEW OF THE DECISION OF THE
DIRECTOR GENERAL OF THE GENERAL JUDICIAL BODY OF THE
SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE**

Jocelyn Zefanya Tjandra

Faculty of Law, University of Surabaya

Contributor:

- 1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.*
- 2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.*

ABSTRACT

Restorative justice has become a necessity in Indonesia's criminal justice system. This is important due to the lack of justice for victims and the overcrowding of correctional institutions in Indonesia. The application of restorative justice in the crime of murder is also considered unfair to some parties, even though restorative justice is used to alleviate criminal sanctions. This paper focuses on the application of restorative justice used by Judges as an excuse to alleviate criminal sanctions for murder based on Director General of Badilum Letter Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning the Implementation of Guidelines for the Application of Restorative Justice. The research method used in this writing is normative juridical, which uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the analysis show that restorative justice cannot be used as an excuse to alleviate criminal sanctions, because the criminal offense committed is a serious criminal offense, namely murder. Letter of the Director General of Badilum Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 determines that criminal cases that can be terminated based on restorative justice are minor crimes, cases of women in conflict with the law, children's cases and narcotics cases. The crime of murder is not included in the scope of the guidelines for the application of restorative justice, so that the crime of murder cannot be resolved with restorative justice.

Keywords: Restorative Justice; Forgiveness; Mitigation of Criminal Sanction.